



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat...

- d. memperkuat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Manajemen Risiko meliputi tahapan:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko; dan
 - e. pengendalian risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan program dan kegiatan;
 - c. penetapan target kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 50 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Jln. Mayor Abdurachmah No. 107 Telp/Fax (0261) 201936



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa Kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT. atas berkah dan rahmat-Nya bahwa dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen perencanaan yang sangat penting dalam rangka mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang selama lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di tingkat lokal. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan perencanaan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, hingga indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

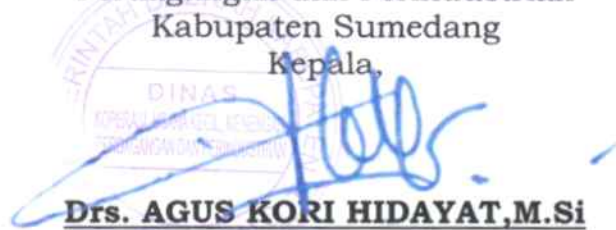
Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam proses penyusunan Rencana Strategis ini.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja yang strategis dan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, serta menjadi acuan bersama dalam mendorong kemajuan pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan di Kabupaten Sumeda. Kami juga membuka ruang evaluasi dan

pembaruan secara berkala sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang yang lebih maju, responsif, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 18 September 2025
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang
Kepala,



Drs. AGUS KORI HIDAYAT, M.Si

NIP. 19720830 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	18
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	18
2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ...	43
3.1. Tujuan	43
3.2. Sasaran	48
3.3. Strategi	47
3.4. Arah Kebijakan	53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	56
4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	56
4.3. Indikator Kinerja Utama	157
4.4. Indikator Kinerja Kunci	164
BAB V PENUTUP	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	21
Gambar 3. 1 Konsep Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	47
Gambar 3. 3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	53
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	22
Tabel 2.2. 2 Jumlah Pegawai menurut Golongan	23
Tabel 2.2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel 2.2. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	25
Tabel 2.2. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	25
Tabel 2.2. 5 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian.....	26
Tabel 2.3. 1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian ..	29
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	40
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	59
Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan	91
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	150
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	158
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	165

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Renstra ini disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang memberikan arahan normatif bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dan terintegrasi..

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah , Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain dari itu Perubahan Renstra Perangkat Daerah diakibatkan juga karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Koperasi, usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan selama Periode Lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

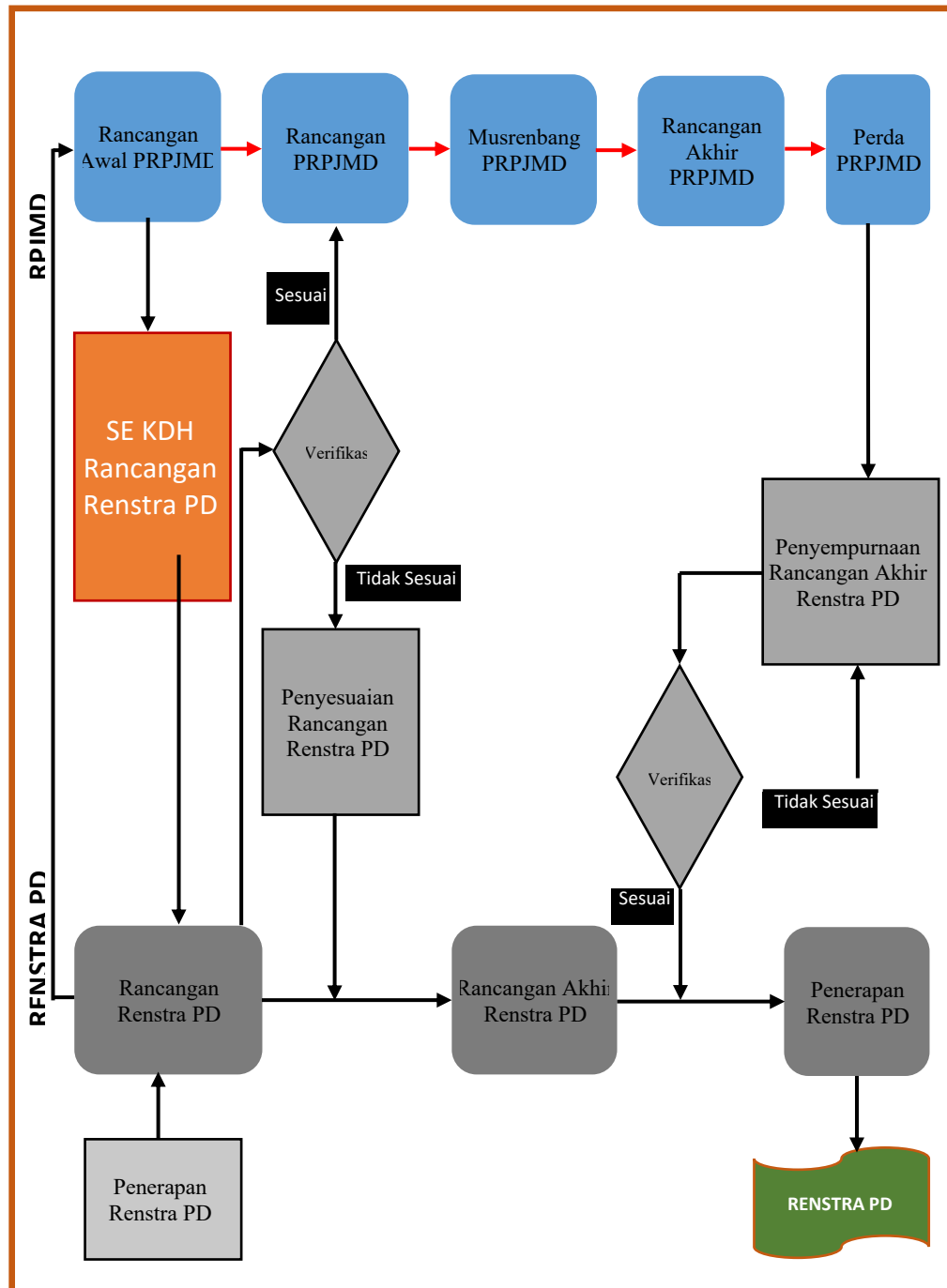
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian ;

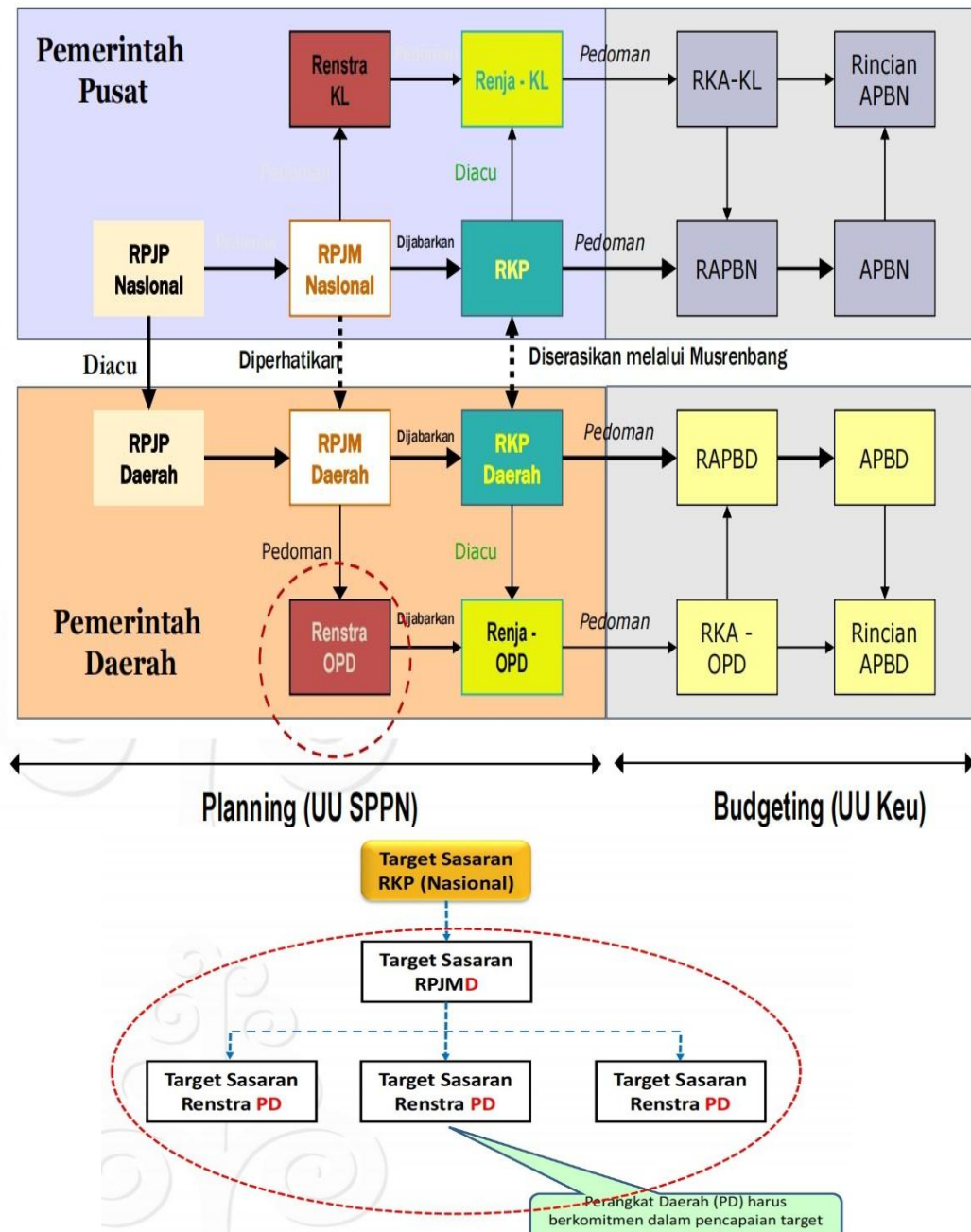
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian ;
4. Penetapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Adapun bagan alur penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang di mulai dari penyusunan rencana Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan penetapan Perubahan Renstra OPD (lihat Gambar 1.1). Selain itu Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang periode Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari hubungan dan keterkaitan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang (PRPJMD) periode 2025 – 2029 (lihat Gambar 1.2). Untuk selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam dokumen Renja dan RKA.

Gambar 1.1

**Bagan Alur Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
Periode 2025-2029**



Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Dengan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Periode 2025–2029 maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian diharapkan mampu melaksanakan tugas dan

kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dapat turut adil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas Pembangunan di Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan DaUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4700);
5. UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik
 6. UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 11. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 14. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat ;
 15. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 16. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
-

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 4815);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 26. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
-

27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 29. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
 31. Peraturan Pemerintah RI No.44 tahun 1997 tentang Kemitraan;
 32. Peraturan Pemerintah RI No.32 tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil;
 33. Peraturan Pemerintah RI No.17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM;
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035;
 35. Peraturan Presiden No.98 tahun 2014 tentang Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 36. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 37. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
-

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
40. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11 /Per/M.KUMKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;
41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
42. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
43. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturrn Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
52. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

54. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
58. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 2025)
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
62. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang (RPIK) 2023-2043
63. Peraturan Daerah Provinsi No.08 tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro;

64. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
65. Peraturan Bupati Sumedang No.63 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro;
66. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
67. Peraturan Bupati Sumedang No 39 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro perubahan dari Perbup Sumedang No.63 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir bagi usaha mikro;
68. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mewujudkan Visi dan Misi Kepala

Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 yaitu Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang relevan dan signifikan disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing BAB.

Bab. II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk pencapaian SPM sesuai dengan tupoksi
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bapperida, kelompok sasaran adalah Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

Bab. III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

1.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

1.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

- a. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif

berisikan langkah• langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD

- b.** Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel 3.4

1.4 Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

- a.** Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab. IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

- a.** Program, kegiatan dan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatakhirannya

- b.** Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambunga perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- a.** Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- b.** IKK berlaku dari Tahun 2025 hingga tahun 2030

Bab. V Penutup

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 yang kemudian telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

a.1. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

a.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

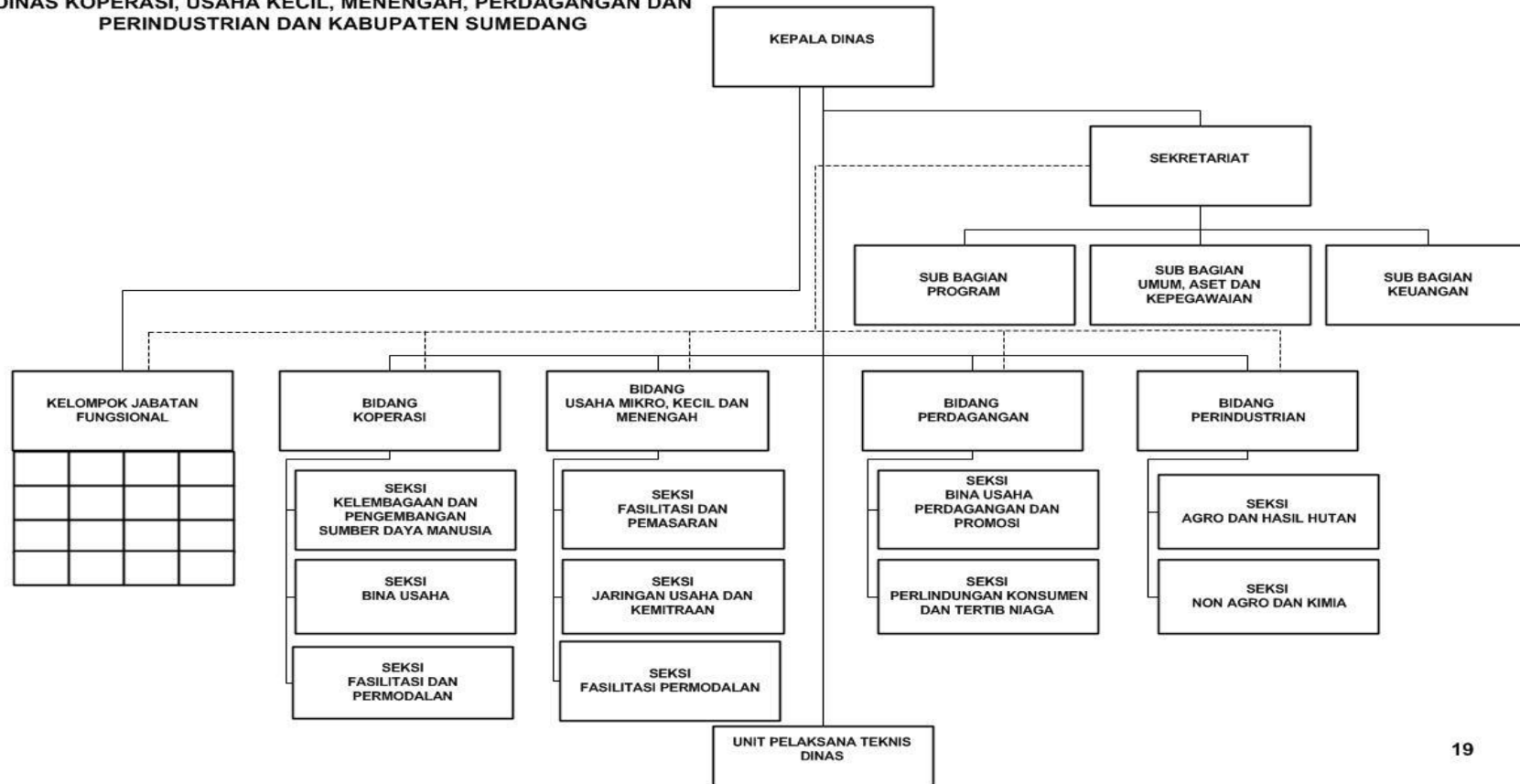
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Kecil, Menengah;
- e. Bidang Perdagangan;
- f. Bidang Perindustrian;
- g. Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana Gambar 2.1 dibawah ini :

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN DAN KABUPATEN SUMEDANG



19

b. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

Sampai saat ini atau tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dan Jajarannya sebanyak 51 (lima puluh satu) Orang pegawai dengan profil demografi sebagai berikut:

b.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel jumlah pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sebanyak 51 orang pegawai paling banyak berada di kelompok usia di diatas 50 tahun sebanyak 33 orang., dana diantara 41 s/d 45 tahun sebanyak 15 orang, sedangkan sisinya sebanyak 3 orang usia diantara 26-30 tahun Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1 di bawah ini;

Tabel 2.2. 1

Jumlah Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat						6	4	10
2	Bidang Koperasi		2				2	1	5
3	Bidang UMKM		1					5	6
4	Bidang Perdagangan						1	4	5

5	Bidang Perindustrian							4	4
6	UPTD						6	15	21
TOTAL			3				15	33	51

b.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel dibawah, pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang paling banyak ada pada golongan III sebanyak 30 Orang sedangkan yang menempati golongan IV sebanyak 8 Orang. Untuk sisanya berada di golongan II

Tabel 2.2. 2
Jumlah Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		2	6	2	10
2	Bidang Koperasi		1	3	1	5
3	Bidang UMKM			5	1	6
4	Bidang Perdagangan			3	2	5
5	Bidang Perindustrian		1	2	1	4
6	UPTD		9	11	1	21
TOTAL			13	30	8	51

b.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data tabel menurut tingkat pendidikannya Sebagian besar pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan sarjana /S-1 sebanyak 25 Orang

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sudah memadai

Dalam Perspektif kedepan perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan tingkat pendidikan pegawai ke jenjang S1 dan S2. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. 3
Jumlah Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D III	S1	S2	
1	Sekretariat	2	1	6	1	10
2	Bidang Koperasi	1	1	2	1	5
3	Bidang UMKM			5	1	6
4	Bidang Perdagangan		1	3	1	5
5	Bidang Perindustrian		1	2	1	4
6	UPTD	11	1	7	2	21
TOTAL		14	5	25	7	51

b.4 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel dibawah dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, sebagai berikut :

Tabel 2.2. 4

Jumlah Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Jabatan	Golongan		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	6	1	7
4	Non Eselon	15	23	38
TOTAL		25	26	51

b.5 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana dan prasarana di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.2. 5

Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian s/d TA. 2025

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	11	10		1	

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
2.	Kendaraan roda 2	26	24		2	
3.	Peralatan kantor : - Komputer PC - Laptop - Meja Kayu Rotan - Meja Rapat - Meja Tulis - Meja Biro - Lemari Besi - Lemari Kayu - Kursi Rapat - Kursi Tamu - Kursi Lipat - Kursi Kerja - Kursi Putar - Kursi Kerja	58 13 145 7 43 4 3 41 20 5 175 14 29 56	27 12 90 3 1 3 - 27 17 2 107 10 22 49	25 1 35 4 22 1 3 9 2 3 57 2 6 7	6 - - 20 - 20 - - - 5 1 1 11 2 1 - -	
4.	Buku Perpustakaan	-	-		-	

c. Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah. Namun dalam hal melaksanakan kinerja tidak terlepas dari cara untuk mengatur, bagaimana manajemen itu sendiri berjalan. Dimana Manajemen kinerja mengandung arti keseluruhan program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di organisasi perangkat daerah tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas maka peran, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan urusan dibidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sangatlah penting di dalam mengatasi permasalahan dan menjawab tuntutan perubahan dinamika masyarakat. Maka Pemerintah Kabupaten Sumedang telah merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha serta mendorong peningkatan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan , serta diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan komitmen pada inovasi, kolaborasi, dan keberpihakan kepada pelaku usaha lokal, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan merata dapat terwujud, menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital dan globalisasi saat ini

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA PD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif				220					220				
2	Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi				137					137				
3	Peningkatan jumlah koperasi besar													
4	Jumlah UMKM				495					495				
5	Jumlah UMKM yang mendapat Sarana dan prasarana				1062					1062				
6	Cakupan jenis pengawasan perdagangan				2850					4104				
7	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang dibina				241					209				
8	Jumlah pasar Rakyat yang direvitalisasi				9					9				
9	Peningkatan kualitas IKM				25					25				
10	Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasaran				17					17				

RENSTRA DISKOPUKMPP 2025-2029

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA PD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
11	Jumlah Promosi Sentra Industri				2					2				
12	Jumlah koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian					101					76			
13	Peningkatan jumlah koperasi aktif					7					3			
14	Jumlah UMKM					30								
15	Jumlah UMKM yang mendapat Sapras					1694					1095			
16	Jumlah Pasar yang di revitalisasi					10					1			
17	Cakupan Jenis pengawasan perdagangan					4					2			
18	Jumlah UTP yang ditera					28502					1293			
19	Peningkatan jumlah IKM					225					105			
20	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi						40%							
21	Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian						30							
22	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan						10%							

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA PD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
23	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil						20%							
24	Jumlah rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan						20%							
25	Jumlah laporan STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						4							
26	Jumlah produk ekspor						7527							
27	Persentase alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang terstandardisasi						28502							
28	Jumlah Penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri						7525							
29	Jumlah pembangunan industri sesuai perencanaan						40%							
30	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan							100%					100	100
31	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi							100%					100	100

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA PD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
32	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan							50,51%					70,51	
33	Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian							12,08%					22,08	60,16
34	Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan							5,15%					7,15	32,85
35	Persentase UMKM yang diberdayakan							0,34%					0,50	3,68
36	persentase UMKM yang di kembangkan							0,22%					0,40	87,5
37	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan							0,43					52,00	100,00
38	Persentase stabilitasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting							12					12	100
39	Persentase pengembangan ekspor							10,00					10,00	37,06
40	Persentase alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang terstandardisasi							100%					100	91,67
41	Persentase pembangunan industri sesuai perencanaan							30,00					45,00	100,00

RENSTRA DISKOPUKMPP 2025-2029

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA PD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
42			Meningkatnya Koperasi yang berkualitas							34,78	34,78	38,79%	18,36%	43,31%
43			Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha							2,56%	5,92	8,87%	5,52%	8,70%
44			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)							13,23%	9,3	9,30%	23,41%	22,44%
45			Persentase Kinerja Realisasi Pupuk							66,88%	40,08	32,89%	202,35%	216,88%
46			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku							4,70%	4,94	5,31%	6,67%	6,88%
47			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota							0,12	3,87%	70,37%	25,92%	71,57%
48			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK									100%		100%

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA PD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
49			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota								100		100%	100%
50			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait								100			
51			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah											
52			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini								75%	75%	75%	70,59%

Penjelasan dari Tabel 2.6 diatas adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Masyarakat dalam Memahami Program Prioritas Pemerintah Daerah ini mengukur seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap program prioritas tersebut.

Faktor Pendorong Keberhasilan

Beberapa faktor yang kemungkinan besar berkontribusi terhadap pencapaian yang melebihi target ini antara lain:

- a. Strategi Komunikasi Publik yang Efektif Pemerintah daerah kemungkinan telah menjalankan strategi komunikasi dan sosialisasi yang efektif, seperti melalui media massa, media sosial, forum warga, dan kegiatan tatap muka langsung.
- b. Keterlibatan Masyarakat Partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah, sosialisasi program, atau kegiatan pembangunan daerah mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap program prioritas.
- c. Urusan koperasi, pada tahun 2020 cakupan koperasi aktif baru mencapai sekitar 49 persen dari target, dan pada 2021 capaian masih berada pada kisaran yang sama. Namun demikian, indikator koperasi modern menunjukkan kemajuan yang pesat. Pada 2022 target dua koperasi modern berhasil dicapai penuh, dilanjutkan dengan tiga koperasi modern pada 2023, dan pada 2024 realisasi mencapai tujuh koperasi modern, atau hampir dua kali lipat dari target yang ditetapkan.
- d. Urusan UMKM memperlihatkan perkembangan positif. Jumlah UMKM pada 2020 sedikit melebihi target, dan

pada 2021 terjadi lonjakan besar dengan realisasi lebih dari tiga kali lipat dari target yang direncanakan. Untuk indikator usaha mikro yang naik omzet, capaian tahun 2022 dan 2023 konsisten melampaui target, masing-masing 163 persen dan 102 persen. Begitu pula pada indikator usaha mikro yang berkembang, capaian 2024 berada di atas target dengan realisasi lebih dari 112 persen.

- e. Urusan perdagangan, laju pertumbuhan sub-sektor perdagangan besar dan eceran sempat berada di bawah target pada 2020, namun berhasil meningkat pada 2021 hingga melampaui target lebih dari 115 persen. Volume perdagangan juga menunjukkan perkembangan positif, dengan capaian penuh pada 2022 dan peningkatan signifikan pada 2023 yang bahkan jauh melebihi kisaran target yang ditetapkan.
 - f. Pertumbuhan unit usaha industri baru di Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Persentase pertumbuhan industri kecil awalnya berada pada level 8,57, meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 32,63, dan pada periode berikutnya melonjak tajam hingga mencapai 380,75. Hal ini mencerminkan adanya dinamika yang kuat dalam pengembangan industri kecil baru, dengan tren pertumbuhan yang jauh melampaui target maupun capaian sebelumnya.
2. Secara keseluruhan, kinerja sektor koperasi, UMKM, perdagangan, dan industri di Kabupaten Sumedang selama 2020–2024 menunjukkan tren positif dan progresif. Walaupun terdapat tantangan pada awal periode, capaian pada tahun-tahun berikutnya berhasil melampaui target, bahkan dengan peningkatan yang sangat tinggi pada

indikator tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program pengembangan ekonomi daerah mulai membuahkan hasil nyata, terutama dalam mendorong modernisasi koperasi, pertumbuhan UMKM, serta peningkatan unit usaha industri baru.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

Perumusan isu-isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategisnya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Koperasi,

Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang periode 2025-2029. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.a
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Pemasalahan dalam Bidang Koperasi	1. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi 2. Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya 3. Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi 4. Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi
2	Permasalahan dalam Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha 2. Database UMKM belum tersedia secara akurat 3. Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing 4. Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan 5. Cakupan pemasaran masih terbatas
3	Permasalahan dalam Bidang Perdagangan	1. Masih rendahnya kualitas pendataan supplier distributor 2. Masih rendahnya pengawasan di bidang perdagangan 3. Masih rendahnya pembinaan pelaku usaha
4	Permasalahan dalam Bidang Perindustrian	1. Masih kurangnya sarana pendukung industri 2. Masih rendahnya hasil industri yang tersertifikasi (halal, PIRT) 3. Belum akuratnya data IKM (Industri Kecil Menengah)
5	UPTD	1. Adanya pasar-pasar illegal 2. Adanya reparatir illegal

b. Isu Strategis

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan capaian Renstra Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2025-2029 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendag, dan Kemenperin sebagaimana Tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah
Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

Sasaran pada Renstra Kementerian Koperasi	Sasaran pada Renstra Kementerian Perdagangan	Sasaran pada Renstra Kementerian Perindustrian	Sasaran pada Renstra DKKP Kabupaten Sumedang	Sasaran pada Renstra Dinas Provinsi Jabar
1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional 2. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM 3. Peningkatan daya saing 4. Peningkatan produksi dan pemasaran produk UKM nasional 5. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM 6. Pengembangan wirausaha koperasi dan UKM 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM	1. Terwujudnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil dan terjangkau 2. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga 3. Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab 4. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang 5. Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan 6. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah barang dan jasa	1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional 2. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri 3. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional 4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi 5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri 6. Menguatnya struktur industri 7. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri 8. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non fiskal 9. Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi 10. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan	1. Peningkatan kapasitas KUMKM 2. Meningkatnya pertumbuhan KUMKM 3. Terbukanya akses pembiayaan bagi KUMKM 4. Meningkatnya minat wirausaha 5. Meningkatnya kemampuan wirausaha baru	1.

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Koperasi Aktif
2. Masih Rendahnya Kualitas Produk UMKM
3. Belum Efektifnya Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan
4. Masih Rendahnya Pembinaan IKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pelayanan publik merupakan faktor penunjang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar, antara lain kompetensi SDM yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum sepenuhnya inklusif, serta ketimpangan aksesibilitas layanan di wilayah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Selain itu, reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, isu KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang yang relevan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas regulasi, koordinasi perencanaan, serta pengelolaan wilayah yang mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Isu strategis ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada periode perencanaan

mendatang. Penanganan isu ini secara konsisten akan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdaya saing.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun visi pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2025-2029 sebagai berikut.

“Sumedang SIMPATI Semakin Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya. Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Sejahtera : Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infranstruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

Agamis : Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai

agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan, serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan shareholding pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan suatu daerah.

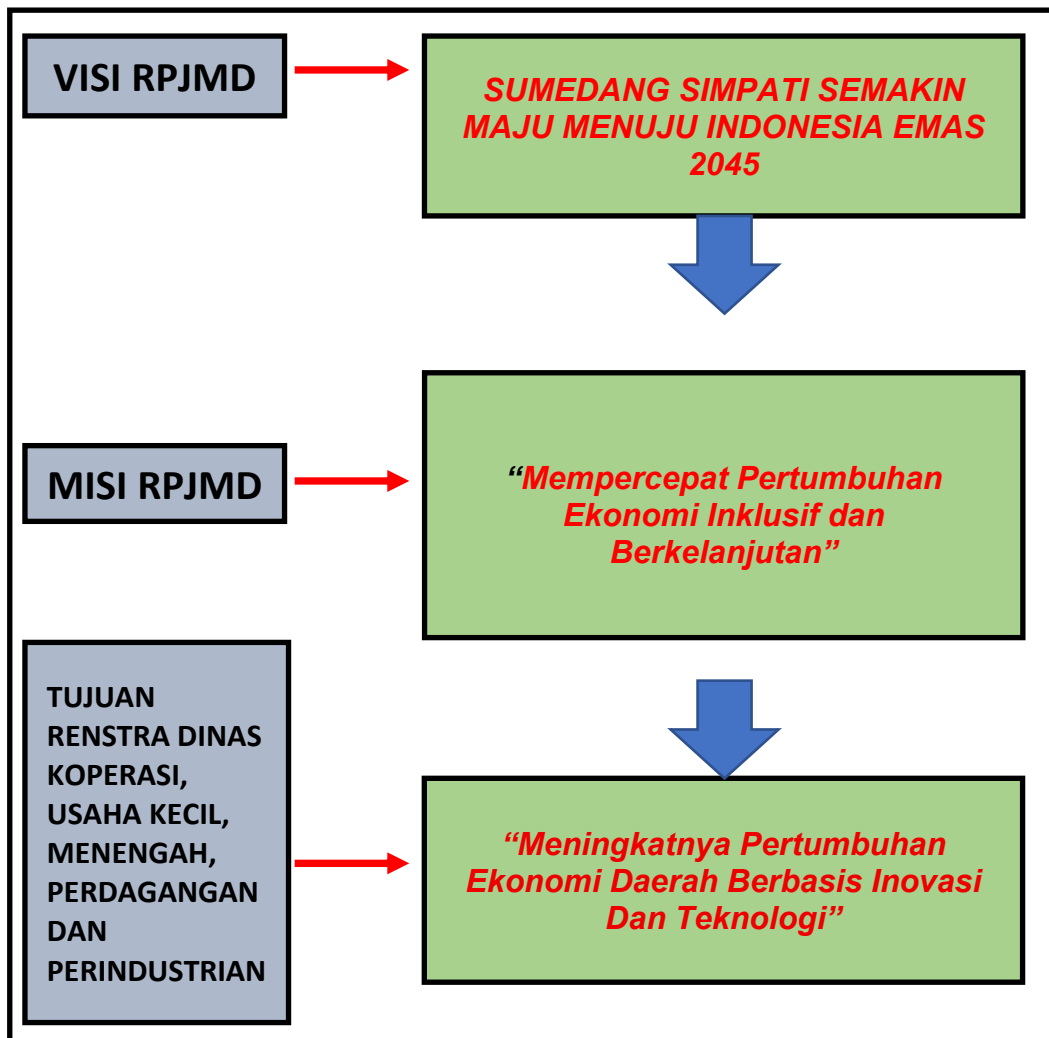
Profesional : Good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

Kreatif : Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitar. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (trickle down effect) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Untuk merealisasikan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2029 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan. Tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah :
“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi Dan Teknologi”

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini. :



Tabel 3.1. Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi ke- 4: Mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sumedang	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	5.98	7.97	9.96	11,95	13,94	15,93	
		Meningkatnya usaha micro di Kabupaten Sumedang	Pertumbuhan Wirausaha	15.338	15,488	15,638	15,788	15,938	16,088	
		Meningkatnya volume perdagangan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	100	100	100	100	100	
		Peningkatan unit usaha industri baru	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	10.29	12.02	13.76	15.51	17.26	19,02	

3.3. Strategi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan peran koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan
2. Peningkatan pembinaan melalui aspek sdm, usaha dan fasilitasi permodalan
3. Peningkatan kualitas UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dan pendukung usaha
4. Peningkatan efisiensi perdagangan masyarakat melalui perlindungan konsumen dan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan
5. Peningkatan daya saing industri melalui peningkatan kapasitas pelaku IKM
6. Peningkatan teknologi produksi melalui fasilitasi peralatan/mesin produksi
7. Peningkatan kualitas produksi melalui fasiltasi aspek legalitas produk.

Penjelasan dan keterkaitan antara sasaran, indikator sasaran dan strategi dijelaskan oleh tabel dibawah ini :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sumedang	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Revitalisasi dan Penataan Koperasi
		Peningkatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola
		Digitalisasi dan Inovasi Koperasi
		Peningkatan Akses Permodalan dan Kemitraan
		Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala
Meningkatnya usaha micro di Kabupaten Sumedang	Pertumbuhan Wirausaha	Peningkatan Kapasitas SDM dan Literasi Bisnis

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
		Fasilitasi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, serta program pembiayaan lainnya.
		Peningkatan Legalitas dan Formalisasi Usaha
		Pemanfaatan Akses Pasar dan Promosi Produk Lokal
		Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Usaha
		Klasterisasi dan Pengembangan Sentra Usaha
Meningkatnya volume perdagangan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Penguatan Infrastruktur Perdagangan
		Mendorong pelaku usaha memanfaatkan e-commerce, marketplace, dan sistem pembayaran digital.
		Menyelenggarakan pameran, expo, dan kerja sama antar daerah untuk memperluas jangkauan produk Sumedang.
		Pelatihan dan pendampingan pelaku usaha agar mampu memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar.
		Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga barang strategis agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
		Menarik investor dan memperluas jaringan distribusi melalui kerja sama dengan sektor swasta dan BUMD.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Peningkatan unit usaha industri baru	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Pengembangan Sentra Industri Potensial melalui Mendorong tumbuhnya unit industri baru berbasis potensi lokal seperti pangan olahan, kerajinan, dan tekstil.
		Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial serta pendampingan bagi calon wirausaha industri.
		Mempermudah proses perizinan usaha industri melalui OSS dan penerbitan NIB, IUI, dan sertifikasi produk.
		Membantu pelaku industri baru mengakses pembiayaan serta teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas.
		Mendorong kolaborasi antara industri baru dengan pelaku industri besar, BUMD, dan pelaku pasar.
		Mendukung promosi produk industri baru melalui expo, katalog digital, dan platform e-commerce.

Dalam penyusunan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 terdapat penahapan pembangunan yang dijabarkan per tahap 5 tahun atau per tahun sebagai langkah bertahap menuju tujuan strategis, hal ini dapat dilihat pada Tabel penahapan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dibawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan RENSTRA

TAHAP I -2026	TAHAP II -2027	TAHAP III -202PD8	TAHAP IV -2029	TAHAP V -2030
-1	-2	-3	-4	-5
Meningkatkan	Mengoptimalkan	Mengefektifkan	Pemantapan	Perwujudan
· Fokus pada penguatan dasar kelembagaan koperasi, UMKM, perdagangan, dan industri.	· Optimalisasi sarana perdagangan tradisional dan modern untuk memperkuat jaringan distribusi.	· Penerapan sistem informasi industri dan perdagangan yang terintegrasi dan akurat.	· Pemantapan koperasi modern berbasis digital dan berdaya saing.	· Terwujudnya ekosistem koperasi, UMKM, perdagangan, dan industri yang tangguh, inklusif, dan kompetitif.
· Penyediaan layanan perizinan yang lebih mudah dan cepat melalui digitalisasi.	· Penguatan promosi produk unggulan daerah melalui event, pameran, dan platform digital.	· Efektivitas pengawasan barang beredar serta perlindungan konsumen.	· Pengembangan ekspor produk lokal melalui fasilitasi regulasi, logistik, dan jaringan pasar internasional.	· Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
· Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan UMKM melalui pelatihan.	· Mendorong kemitraan antara UKM dengan industri besar, BUMN, maupun swasta.	· Penguatan hilirisasi produk pertanian dan UMKM agar memiliki nilai tambah.	· Peningkatan kualitas sarana perdagangan agar lebih modern, higienis, dan ramah lingkungan.	· Terciptanya lebih banyak wirausaha baru yang inovatif dan berorientasi pasar global.
· Fasilitasi akses permodalan dan pendampingan usaha mikro agar mampu naik kelas.	· Optimalisasi kawasan industri agar lebih produktif dan mampu menarik investasi.	· Efektivitas program transformasi UMKM dari informal ke formal.	· Pemantapan iklim usaha yang kondusif dengan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.	· Perwujudan Sumedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal,

TAHAP I -2026	TAHAP II -2027	TAHAP III -202PD8	TAHAP IV -2029	TAHAP V -2030
-1	-2	-3	-4	-5
				digitalisasi, dan kemitraan global.

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang pada renstra 2025-2029 adalah:

1. Sasaran ; Meningkatnya Koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sumedang

Arah kebijakan :

- 1.1. Penguatan Kelembagaan Koperasi;
- 1.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- 1.3. Modernisasi dan Digitalisasi Koperasi;
- 1.4. Pembukaan Akses Permodalan dan Pembiayaan;
- 1.5. Penguatan Jaringan Usaha dan Kemitraan;
- 1.6. Pembinaan dan Pengawasan Berkelanjutan;
- 1.7. Diversifikasi Usaha Koperasi.

2. Sasaran ; Meningkatnya usaha micro di Kabupaten Sumedang

Arah kebijakan :

- 2.1. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro;
- 2.2. Kemudahan Akses Permodalan;
- 2.3. Penguatan Akses Pasar;
- 2.4. Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Pendukung;
- 2.5. Pendampingan dan Inkubasi Bisnis;
- 2.6. Digitalisasi Usaha Mikro;
- 2.7. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Usaha

3. Sasaran : Meningkatnya volume perdagangan

Arah kebijakan :

- 3.1. Pengembangan Infrastruktur Perdagangan;
- 3.2. Peningkatan Akses Pasar;
- 3.3. Digitalisasi dan Modernisasi Perdagangan;
- 3.4. Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok;
- 3.5. Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- 3.6. Fasilitasi Regulasi dan Iklim Usaha Kondusif;
- 3.7. Peningkatan Kapasitas SDM Perdagangan.

4. Sasaran : Peningkatan unit usaha industri baru:

Arah kebijakan :

- 4.1. Pengembangan Sentra dan Kawasan Industri;
- 4.2. Kemudahan Akses Permodalan dan Investasi;
- 4.3. Peningkatan Kapasitas SDM Industri;
- 4.4. Peningkatan Inovasi dan Teknologi;
- 4.5. Penguatan Rantai Pasok dan Kemitraan;
- 4.6. Dukungan Regulasi dan Perizinan;
- 4.7. Promosi dan Pemasaran Produk Industri

Penjelasan keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dijelaskan dengan Tabel dibawah ini :

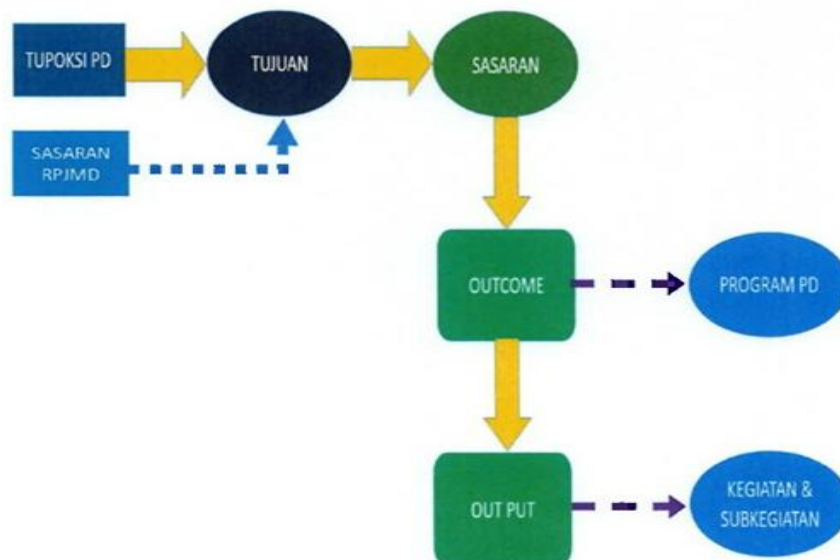
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029				
NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kualitas dan daya saing industri kecil menengah dan Koperasi	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Penilaian Kesehatan koperasi KSP/USP dan Penghargaan Koperasi KSP/USP	
2	Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Komoditas Daerah	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen produksi dan kualitas produk.	Penyediaan sarana prasarana usaha perdagangan di pasar rakyat	
3	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur	Pengembangan Industri Berbasis Keunggulan Wilayah	Percepatan Pembangunan Kawasan Industri	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGARAAN URUSAN

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 merupakan hasil *cascading* dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Proses *cascading* dilakukan untuk memastikan keterkaitan yang konsisten dan berjenjang antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, sehingga setiap capaian kinerja perangkat daerah langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah



*Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian*

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi instrumen operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan RPJMD dan tujuan strategis Renstra, sehingga diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis serta mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Selain itu, penyusunan program dan kegiatan juga mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sehingga pelaksanaannya dirancang secara bertahap, prioritas, dan berkesinambungan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang terbagi dalam empat bidang utama, yaitu Bidang Koperasi, Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.

Tabel 4.1. Teknik merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 4 : ' Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sumedang	Koperasi memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel				
	Terkendalinya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah				Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
						PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
						Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
						Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
						Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
					Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
						Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan Restrukturisasi Usaha		
					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya usaha micro di Kabupaten Sumedang	Terwujudnya usaha mikro yang tangguh, berdaya saing, berkontribusi pada pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah berbasis kerakyatan		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
					Pertumbuhan Wirausaha		
						Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pemulihan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
					Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
						Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah yang Difasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	Meningkatnya volume perdagangan	Terciptanya perputaran ekonomi yang lebih besar, kontribusi signifikan pada PDRB, dan terbukanya akses pasar luas bagi produk lokal			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
					Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
						Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
						Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
					Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	
						Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
					Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
					Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
						Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2,	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		
						Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
					Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
						Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang	Pelaksanaan fasilitas terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					komoditas potensial Sistem Resi Gudang		
						Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
						Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan Pestisida Bersubsidi		
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
					Nilai Ekspor Barang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
						Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		
					Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
					Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Penyidikan Metrologi Legal	
					Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
						Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Peningkatan unit usaha industri baru	Bertambahnya jumlah dan kapasitas industri yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat diversifikasi ekonomi		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
						Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
						[Hibah] - kepada Badan atau Lembaga Perindustrian	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
					Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
						Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
						Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Program Pengembangan Umkm, Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub

kegiatan yang memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian *outcome* yaitu :

1. Koperasi memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel;
2. Terwujudnya usaha mikro yang tangguh, berdaya saing, berkontribusi pada pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah berbasis kerakyatan;
3. Terciptanya perputaran ekonomi yang lebih besar, kontribusi signifikan pada PDRB, dan terbukanya akses pasar luas bagi produk lokal;
4. Bertambahnya jumlah dan kapasitas industri yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat diversifikasi ekonomi.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat. Pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, serta menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.31	85.31	86.3 2	12,142,135,970.00	87.3 2	12,500,000,000.00	88.3 2	12,600,000,000.00	89.3 2	12,700,000,000.00	90.3 2	12,799,966,594.25	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	28	28	165,500,000.00	28	182,050,000.00	28	175,670,250.00	28	175,512,750.00	28	177,267,877.50	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	3	3	50,500,000.00	3	61,300,000.00	3	53,712,750.00	3	53,555,250.00	3	54,090,802.50	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	12,000,000.00	3	12,600,000.00	3	12,726,000.00	3	12,726,000.00	3	12,853,260.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	10,000,000.00	1	10,500,000.00	1	10,605,000.00	1	10,605,000.00	1	10,711,050.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	6,000,000.00	1	6,300,000.00	1	6,363,000.00	1	6,363,000.00	1	6,426,630.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2	6,500,000.00	2	6,825,000.00	2	6,893,250.00	2	6,893,250.00	2	6,962,182.50	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19	19	19	40,000,000.00	19	42,000,000.00	19	42,420,000.00	19	42,420,000.00	19	42,844,200.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4	3,000,000.00	4	3,150,000.00	4	3,181,500.00	4	3,181,500.00	4	3,213,315.00	
Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1	2,500,000.00	1	2,625,000.00	1	2,651,250.00	1	2,651,250.00	1	2,677,762.50	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	1	2,500,000.00	1	2,625,000.00	1	2,651,250.00	1	2,651,250.00	1	2,677,762.50	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	1	25,000,000.00	1	26,250,000.00	1	26,512,500.00	1	26,512,500.00	1	26,777,625.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	-	5	2,500,000.00	5	2,625,000.00	5	2,651,250.00	5	2,651,250.00	5	2,677,762.50	
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-	-	1	2,500,000.00	1	2,625,000.00	1	2,651,250.00	1	2,651,250.00	1	2,677,762.50	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	-	1	2,500,000.00	1	2,625,000.00	1	2,651,250.00	1	2,651,250.00	1	2,677,762.50	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daera	24	24	24	8,561,862,368.50	24	8,735,522,718.42	24	8,810,468,968.42	24	8,898,815,685.61	24	8,988,066,475.59	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184	184	184	8,523,862,368.50	184	8,693,722,718.42	184	8,767,832,968.42	184	8,855,753,325.61	184	8,944,573,491.99	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12,000,000.00	12	13,200,000.00	12	13,464,000.00	12	13,598,640.00	12	13,734,626.40	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	12	3,000,000.00	12	3,300,000.00	12	3,366,000.00	12	3,399,660.00	12	3,433,656.60	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1	3,000,000.00	1	3,300,000.00	1	3,366,000.00	1	3,399,660.00	1	3,433,656.60	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak LanjutPemeriksaan	-	-	2	2,500,000.00	2	2,750,000.00	2	2,805,000.00	2	2,833,050.00	2	2,861,380.50	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	12	15,000,000.00	12	16,500,000.00	12	16,830,000.00	12	16,998,300.00	12	17,168,283.00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	4	2,500,000.00	4	2,750,000.00	4	2,805,000.00	4	2,833,050.00	4	2,861,380.50	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15	7	7	227,000,000.00	7	238,350,000.00	7	239,473,500.00	7	241,868,235.00	7	244,286,917.35	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	2	6,000,000.00	2	6,300,000.00	2	6,615,000.00	2	6,681,150.00	2	6,747,961.50	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7	7	7	160,000,000.00	7	168,000,000.00	7	168,000,000.00	7	169,680,000.00	7	171,376,800.00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1	5,000,000.00	1	5,250,000.00	1	5,512,500.00	1	5,567,625.00	1	5,623,301.25	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12	26,000,000.00	12	27,300,000.00	12	27,846,000.00	12	28,124,460.00	12	28,405,704.60	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	3	12	12,000,000.00	12	12,600,000.00	12	12,600,000.00	12	12,726,000.00	12	12,853,260.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	96	96	12	13,000,000.00	12	13,650,000.00	12	13,650,000.00	12	13,786,500.00	12	13,924,365.00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1	5,000,000.00	1	5,250,000.00	1	5,250,000.00	1	5,302,500.00	1	5,355,525.00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan Retribusi Daerah			7	17,500,000.00	7	19,250,000.00	7	20,212,500.00	7	20,414,625.00	7	20,618,771.25	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	12	2,500,000.00	12	2,750,000.00	12	2,887,500.00	12	2,916,375.00	12	2,945,538.75	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	1	2,500,000.00	1	2,750,000.00	1	2,887,500.00	1	2,916,375.00	1	2,945,538.75	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	2	2,500,000.00	2	2,750,000.00	2	2,887,500.00	2	2,916,375.00	2	2,945,538.75	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	-	2	2,500,000.00	2	2,750,000.00	2	2,887,500.00	2	2,916,375.00	2	2,945,538.75	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	-	12	2,500,000.00	12	2,750,000.00	12	2,887,500.00	12	2,916,375.00	12	2,945,538.75	
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	-	-	1	2,500,000.00	1	2,750,000.00	1	2,887,500.00	1	2,916,375.00	1	2,945,538.75	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	12	2,500,000.00	12	2,750,000.00	12	2,887,500.00	12	2,916,375.00	12	2,945,538.75	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai	10	10	11	124,000,000.00	11	129,300,000.00	11	130,665,000.00	11	132,130,725.00	11	132,420,241.50	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	4	3,000,000.00	4	3,150,000.00	4	3,307,500.00	4	3,340,575.00	4	3,373,980.75	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	45,000,000.00	1	46,350,000.00	1	46,350,000.00	1	46,813,500.00	1	46,813,500.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40	40	40	5,000,000.00	40	5,250,000.00	40	5,512,500.00	40	5,567,625.00	40	5,623,301.25	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	2	3,000,000.00	2	3,150,000.00	2	3,307,500.00	2	3,340,575.00	2	3,373,980.75	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	12	3,000,000.00	12	3,150,000.00	12	3,307,500.00	12	3,340,575.00	12	3,373,980.75	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	10	3,000,000.00	10	3,150,000.00	10	3,307,500.00	10	3,340,575.00	10	3,373,980.75	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	1	3,000,000.00	1	3,150,000.00	1	3,150,000.00	1	3,340,575.00	1	3,340,575.00	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	-	10	3,000,000.00	10	3,150,000.00	10	3,307,500.00	10	3,340,575.00	10	3,373,980.75	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	6	8	50,000,000.00	8	52,500,000.00	8	52,500,000.00	8	53,025,000.00	8	53,025,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	50	50	3,000,000.00	50	3,150,000.00	50	3,307,500.00	50	3,340,575.00	50	3,373,980.75	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	510	510	510	3,000,000.00	510	3,150,000.00	510	3,307,500.00	510	3,340,575.00	510	3,373,980.75	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	18	18	18	756,500,000.00	18	794,325,000.00	18	819,341,250.00	18	824,594,662.50	18	824,973,261.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	16,000,000.00	1	16,800,000.00	1	17,640,000.00	1	17,816,400.00	1	17,994,564.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	110,000,000.00	1	115,500,000.00	1	121,275,000.00	1	122,487,750.00	1	122,487,750.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	32,000,000.00	1	33,600,000.00	1	35,280,000.00	1	35,632,800.00	1	35,632,800.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	110,000,000.00	1	115,500,000.00	1	121,275,000.00	1	122,487,750.00	1	122,487,750.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14	14	14	165,000,000.00	14	173,250,000.00	14	181,912,500.00	14	183,731,625.00	14	183,731,625.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	50	50	50	25,500,000.00	50	26,775,000.00	50	28,113,750.00	50	28,394,887.50	50	28,394,887.50	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	1	5,000,000.00	1	5,250,000.00	1	5,512,500.00	1	5,567,625.00	1	5,623,301.25	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	12	3,000,000.00	12	3,150,000.00	12	3,307,500.00	12	3,340,575.00	12	3,373,980.75	
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	280,000,000.00	12	294,000,000.00	12	294,000,000.00	12	294,000,000.00	12	294,000,000.00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	12	5,000,000.00	12	5,250,000.00	12	5,512,500.00	12	5,567,625.00	12	5,623,301.25	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	5,000,000.00	12	5,250,000.00	12	5,512,500.00	12	5,567,625.00	12	5,623,301.25	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39	46	53	269,500,000.00	53	279,915,000.00	53	280,676,250.00	53	280,836,112.50	53	280,997,573.63	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	1	51,000,000.00	1	53,550,000.00	1	53,550,000.00	1	53,550,000.00	1	53,550,000.00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	1	51,000,000.00	1	53,550,000.00	1	53,550,000.00	1	53,550,000.00	1	53,550,000.00	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	20	10	10	51,000,000.00	10	52,530,000.00	10	52,530,000.00	10	52,530,000.00	10	52,530,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	11	20	51,000,000.00	20	52,530,000.00	20	52,530,000.00	20	52,530,000.00	20	52,530,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	7	20	51,000,000.00	20	52,530,000.00	20	52,530,000.00	20	52,530,000.00	20	52,530,000.00	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	1	2,500,000.00	1	2,625,000.00	1	2,756,250.00	1	2,783,812.50	1	2,811,650.63	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	4,000,000.00	1	4,200,000.00	1	4,410,000.00	1	4,454,100.00	1	4,498,641.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	4,000,000.00	1	4,200,000.00	1	4,410,000.00	1	4,454,100.00	1	4,498,641.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	4,000,000.00	1	4,200,000.00	1	4,410,000.00	1	4,454,100.00	1	4,498,641.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29	28	29	1,370,773,601.50	29	1,439,312,281.58	29	1,439,443,531.58	29	1,441,237,966.89	29	1,443,050,346.56	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	60	2,500,000.00	60	2,625,000.00	60	2,756,250.00	60	2,783,812.50	60	2,811,650.63	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	150,000,000.00	12	157,500,000.00	12	157,500,000.00	12	159,075,000.00	12	160,665,750.00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	5	18,273,601.50	5	19,187,281.58	5	19,187,281.58	5	19,379,154.39	5	19,572,945.93	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	1,200,000,000.00	12	1,260,000,000.00	12	1,260,000,000.00	12	1,260,000,000.00	12	1,260,000,000.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107	111	114	649,500,000.00	114	681,975,000.00	114	684,048,750.00	114	684,589,237.50	114	688,285,129.88	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	2	2,500,000.00	2	2,625,000.00	2	2,756,250.00	2	2,783,812.50	2	2,811,650.63	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	35	35	300,000,000.00	35	315,000,000.00	35	315,000,000.00	35	315,000,000.00	35	318,150,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat TakBermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12	12	12	5,000,000.00	12	5,250,000.00	12	5,512,500.00	12	5,567,625.00	12	5,623,301.25	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	22	24	12,000,000.00	24	12,600,000.00	24	13,230,000.00	24	13,362,300.00	24	13,495,923.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	36	37	12,000,000.00	37	12,600,000.00	37	13,230,000.00	37	13,362,300.00	37	13,495,923.00	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	3	3	4,000,000.00	3	4,200,000.00	3	4,410,000.00	3	4,454,100.00	3	4,498,641.00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	1	4,000,000.00	1	4,200,000.00	1	4,410,000.00	1	4,454,100.00	1	4,498,641.00	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	1	300,000,000.00	1	315,000,000.00	1	315,000,000.00	1	315,000,000.00	1	315,000,000.00	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	5,000,000.00	1	5,250,000.00	1	5,250,000.00	1	5,302,500.00	1	5,355,525.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	1	1	1	5,000,000.00	1	5,250,000.00	1	5,250,000.00	1	5,302,500.00	1	5,355,525.00	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehab ilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sumedang														
URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6,510,000,000.00		4,341,087,050.00		4,591,782,805.00		5,114,048,135.50		5,360,039,999.05	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (IKK)	7.97	9.96	11.9 5	5,000,000.00	13.9 4	20,000,000.00	15.9 3	40,000,000.00	17.9 2	60,000,000.00	19.9 1	80,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
SIMPAN PINJAM														
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase rekomendasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	25	30	2,500,000.00	35	10,000,000.00	40	20,000,000.00	45	30,000,000.00	50	40,000,000.00	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	25	30	2,500,000.00	35	10,000,000.00	40	20,000,000.00	45	30,000,000.00	50	40,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penerbitan i Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	5	6	2,500,000.00	7	10,000,000.00	8	20,000,000.00	9	30,000,000.00	10	40,000,000.00	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	5	6	2,500,000.00	7	10,000,000.00	8	20,000,000.00	9	30,000,000.00	10	40,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	59.76	79.68	100	50,000,000.00	100	55,000,000.00	100	60,500,000.00	100	66,550,000.00	100	73,205,000.00	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	150	200	251	50,000,000.00	251	55,000,000.00	251	60,500,000.00	251	66,550,000.00	251	73,205,000.00	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	150	200	251	50,000,000.00	251	55,000,000.00	251	60,500,000.00	251	66,550,000.00	251	73,205,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Yang Sehat	59.76	79.68	100	10,000,000.00	100	30,000,000.00	100	40,000,000.00	100	50,000,000.00	100	60,000,000.00	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150	200	251	10,000,000.00	251	30,000,000.00	251	40,000,000.00	251	50,000,000.00	251	60,000,000.00	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150	200	251	10,000,000.00	251	20,000,000.00	251	30,000,000.00	251	40,000,000.00	251	50,000,000.00	
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	5	10	-	-	251	10,000,000.00	251	10,000,000.00	251	10,000,000.00	251	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N	Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian	49.8	59.76	69.7 2	50,000,000.00	79.6 8	55,000,000.00	89.6 4	60,000,000.00	99.6	65,000,000.00	100	70,000,000.00	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase SDM Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	125	150	175	50,000,000.00	200	55,000,000.00	225	60,000,000.00	250	65,000,000.00	275	70,000,000.00	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	125	150	175	50,000,000.00	200	55,000,000.00	225	60,000,000.00	250	65,000,000.00	275	70,000,000.00	
PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan	60.16	80.08	100	2,325,000,000.00	100	450,000,000.00	100	400,000,000.00	100	600,000,000.00	100	500,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase koperasi yang mendapatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	151	201	251	2,325,000,000.00	251	450,000,000.00	251	400,000,000.00	251	600,000,000.00	251	500,000,000.00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	-	-	25	100,000,000.00	-		30	150,000,000.00	-	-	Progr am Asta cita

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	151	201	251	125,000,000.00	251	150,000,000.00	251	200,000,000.00	251	250,000,000.00	251	300,000,000.00	
Pembentukan Koperasi merah putih (Pelatihan Penataan Manajemen Koperasi					2,000,000,000.00				-		-		-	
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				10	200,000,000.00	10	200,000,000.00	10	200,000,000.00	10	200,000,000.00	10	200,000,000.00	Progr am Asta cita
Meningkatnya usaha micro di Kabupaten Sumedang														
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	31.36	32.09	32.82	380,000,000.00	33.55	450,000,000.00	34.28	500,000,000.00	35.01	550,000,000.00	35.74	600,000,000.00	
	Pertumbuhan Wirausaha													

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	14962	15312	1566 2	380,000,000.00	1566 2	450,000,000.00	1566 2	500,000,000.00	1566 2	550,000,000.00	1566 2	600,000,000.00	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200	250	300	20,000,000.00	350	25,000,000.00	400	27,500,000.00	450	30,250,000.00	500	30,250,000.00	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1305	1455	1605	20,000,000.00	1755	25,000,000.00	1905	27,500,000.00	2055	30,250,000.00	2205	30,250,000.00	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	444	494	544	20,000,000.00	594	25,000,000.00	644	27,500,000.00	694	30,250,000.00	744	30,250,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200	250	300	20,000,000.00	350	25,000,000.00	400	27,500,000.00	450	30,250,000.00	500	30,250,000.00	
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Sertifikasi dan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Standardisasi Usaha Mikro														
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	12813	12863	1286 3	20,000,000.00	1286 3	25,000,000.00	1286 3	27,500,000.00	1286 3	30,250,000.00	1286 3	30,250,000.00	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	75	100	125	280,000,000.00	150	325,000,000.00	175	362,500,000.00	200	398,750,000.00	225	448,750,000.00	
PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (IKK)	3.35	4.32	5.28	3,690,000,000.00	6.24	3,281,087,050.00	7.2	3,491,282,805.00	8.16	3,722,498,135.50	9.12	3,976,834,999.05	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1599	2059	2519	3,690,000,000.00	2979	3,281,087,050.00	3439	3,491,282,805.00	3899	3,722,498,135.50	4359	3,976,834,999.05	
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1599	2059	2519	3,690,000,000.00	2979	3,281,087,050.00	3439	3,491,282,805.00	3899	3,722,498,135.50	4359	3,976,834,999.05	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Penataan Outlet UMKM (Penataan atap gedung)				6	500,000,000.00	8	200,000,000.00	10	200,000,000.00	12	200,000,000.00	14	200,000,000.00	
Penataan UMKM centre (Rumah Kemasan) (Penataan Atap Gedung)				6	500,000,000.00	8	200,000,000.00	10	200,000,000.00	12	200,000,000.00	14	200,000,000.00	
[PIK] - Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM				6	110,000,000.00	8	110,000,000.00	10	110,000,000.00	12	110,000,000.00	14	110,000,000.00	
[PIK] - Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM				6	125,000,000.00	8	125,000,000.00	10	125,000,000.00	12	125,000,000.00	14	125,000,000.00	
Hibah] - kepada Badan atau Lembaga UMKM				6	200,000,000.00	8	200,000,000.00	10	200,000,000.00	12	200,000,000.00	14	200,000,000.00	
[Hibah] - kepada Badan atau Lembaga UMKM				6	200,000,000.00	8	200,000,000.00	10	200,000,000.00	12	200,000,000.00	14	200,000,000.00	
[Hibah] - kepada LPM (UMKM)				6	50,000,000.00	8	50,000,000.00	10	50,000,000.00	12	50,000,000.00	14	50,000,000.00	
[Hibah] - kepada Badan atau Lembaga UMKM				6	39,129,500.00	8	39,129,500.00	10	39,129,500.00	12	39,129,500.00	14	39,129,500.00	
[Hibah] - kepada Badan atau Lembaga UMKM				6	55,000,000.00	8	55,000,000.00	10	55,000,000.00	12	55,000,000.00	14	55,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Meningkatnya volume perdagangan														
URUSAN PEMERINTAHA N PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERDAGANGAN					3,285,416,000.00		4,063,250,000.00		4,469,575,000.00		4,904,032,500.00		5,369,435,750.00	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	100	100	25,000,000.00	100	300,000,000.00	100	325,000,000.00	100	350,000,000.00	100	375,000,000.00	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase dokumen Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1	-		2,500,000.00		5,000,000.00		7,500,000.00		10,000,000.00		12,500,000.00	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik													
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang	20	25	30	2,500,000.00	35	5,000,000.00	40	7,500,000.00	45	10,000,000.00	50	12,500,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	20	25	30	2,500,000.00	35	5,000,000.00	40	7,500,000.00	45	10,000,000.00	50	12,500,000.00	
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1		1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	1	15,000,000.00	1	20,000,000.00	1	25,000,000.00	
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
(STPW) Dalam Negeri	Waralaba (STPW) Dalam Negeri													
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase dokumen Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	1	-	1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	1	15,000,000.00	1	20,000,000.00	1	25,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen pengendalian dan pengawasan bahan berbahaya	1	1	1	7,500,000.00	1	265,000,000.00	1	272,500,000.00	1	280,000,000.00	1	287,500,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1	1	1	2,500,000.00	1	5,000,000.00	1	7,500,000.00	1	10,000,000.00	1	12,500,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	Progr am Asta Cita
PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	88.89	88.89	100	2,557,500,000.00	100	2,813,250,000.00	100	3,094,575,000.00	100	3,404,032,500.00	100	3,744,435,750.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	9	9	9	2,452,500,000.00	9	2,697,750,000.00	9	2,967,525,000.00	9	3,264,277,500.00	9	3,590,705,250.00	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8	8	9	2,368,500,000.00	10	2,605,350,000.00	11	2,865,885,000.00	12	3,152,473,500.00	13	3,467,720,850.00	
Pembangunan 7 Pasar Kecamatan				7	1,868,500,000.00	7	2,055,350,000.00	7	2,260,885,000.00	7	2,486,973,500.00	7	2,735,670,850.00	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9	9	9	84,000,000.00	9	92,400,000.00	9	101,640,000.00	9	111,804,000.00	9	122,984,400.00	
Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
wilayah kabupaten/kota														
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase dokumen Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	1		1	105,000,000.00	1	115,500,000.00	1	127,050,000.00	1	139,755,000.00	1	153,730,500.00	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	1	52,500,000.00	1	57,750,000.00	1	63,525,000.00	1	69,877,500.00	1	76,865,250.00	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	1	52,500,000.00	1	57,750,000.00	1	63,525,000.00	1	69,877,500.00	1	76,865,250.00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Tingkat ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	100	100	457,916,000.00	100	550,000,000.00	100	600,000,000.00	100	650,000,000.00	100	700,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
BARANG PENTING														
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1		1	227,916,000.00	1	280,000,000.00	1	303,000,000.00	1	333,450,000.00		354,600,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	4	4	30,000,000.00	4	35,000,000.00	4	39,000,000.00	4	40,950,000.00	4	42,300,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	12	12	30,000,000.00	12	35,000,000.00	12	39,000,000.00	12	40,950,000.00	12	42,300,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Agen dan Pasar Rakyat														
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	12	12	167,916,000.00	12	210,000,000.00	12	225,000,000.00	12	251,550,000.00	12	270,000,000.00	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kot a	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2		2	180,000,000.00	2	210,000,000.00	2	231,000,000.00	2	242,550,000.00	2	264,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	12	12	60,000,000.00	12	70,000,000.00	12	77,000,000.00	12	80,850,000.00	12	88,000,000.00	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	12	12	60,000,000.00	12	70,000,000.00	12	77,000,000.00	12	80,850,000.00	12	88,000,000.00	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	4	4	60,000,000.00	4	70,000,000.00	4	77,000,000.00	4	80,850,000.00	4	88,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	1		1	50,000,000.00	1	60,000,000.00	1	66,000,000.00	1	74,000,000.00		81,400,000.00	
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4	4	4	25,000,000.00	4	30,000,000.00	4	33,000,000.00	4	37,000,000.00	4	40,700,000.00	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4	4	4	25,000,000.00	4	30,000,000.00	4	33,000,000.00	4	37,000,000.00	4	40,700,000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota (IKK)	83.33	91.67	100	75,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Penyelenggara n Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Laporan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3		154	75,000,000.00	163	150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	60	70	80	30,000,000.00	90	55,000,000.00	100	55,000,000.00	110	55,000,000.00	120	55,000,000.00	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	60	60	60	25,000,000.00	60	55,000,000.00	60	55,000,000.00	60	55,000,000.00	60	55,000,000.00	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10	11	12	10,000,000.00	13	20,000,000.00	14	20,000,000.00	15	20,000,000.00	16	20,000,000.00	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	1	1	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK)	36.26	38.37	42.6 1	70,000,000.00	44.7 3	100,000,000.00	46.8 5	100,000,000.00	48.9 7	100,000,000.00	51.0 9	100,000,000.00	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2	=Jumlah UTTP / J236	2068	70,000,000.00	2199	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1715	1815	1915	50,000,000.00	2015	70,000,000.00	2115	70,000,000.00	2215	70,000,000.00	2315	70,000,000.00	
Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	90	120	150	10,000,000.00	180	15,000,000.00	210	15,000,000.00	240	15,000,000.00	270	15,000,000.00	
Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	0	2	3	10,000,000.00	4	15,000,000.00	5	15,000,000.00	6	15,000,000.00	7	15,000,000.00	
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Lokal yang Terstandarisasi	71.67	80	88.3 3	100,000,000.00	99.6 6	150,000,000.00	99.6 6	200,000,000.00	99.6 6	250,000,000.00	99.6 6	300,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Dokumen Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	43		53	100,000,000.00	58	150,000,000.00	63	200,000,000.00	68	250,000,000.00	73	300,000,000.00	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60	60	60	50,000,000.00	60	75,000,000.00	60	100,000,000.00	60	125,000,000.00	60	150,000,000.00	
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	43	48	53	50,000,000.00	58	75,000,000.00	63	100,000,000.00	68	125,000,000.00	73	150,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Peningkatan unit usaha industri baru														
URUSAN PEMERINTAH N BIDANG PERINDUSTRIAN					580,000,000.00		665,000,000.00		705,000,000.00		945,000,000.00		785,000,000.00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	1		1	567,500,000.00	1	625,000,000.00	1	625,000,000.00	1	825,000,000.00	1	625,000,000.00	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri	1		1	567,500,000.00	1	625,000,000.00	1	625,000,000.00	1	825,000,000.00	1	625,000,000.00	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000.00	-	-	Review
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	1	1	97,000,000.00	1	107,450,000.00	1	107,450,000.00	1	107,450,000.00	1	107,450,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1	1	97,000,000.00	1	106,700,000.00	1	106,700,000.00	1	106,700,000.00	1	106,700,000.00	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	1	97,000,000.00	1	106,700,000.00	1	106,700,000.00	1	106,700,000.00	1	106,700,000.00	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	1	97,000,000.00	1	106,700,000.00	1	106,700,000.00	1	106,700,000.00	1	106,700,000.00	
[Hibah] - kepada Badan atau Lembaga Perindustrian				1	134,500,000.00	1	147,950,000.00	1	147,950,000.00	1	147,950,000.00	1	147,950,000.00	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1	1	45,000,000.00	1	49,500,000.00	1	49,500,000.00	1	49,500,000.00	1	49,500,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan (IKK)	87.5	90	91.67	5,000,000.00	93.34	20,000,000.00	95.01	40,000,000.00	96.68	60,000,000.00	98.35	80,000,000.00	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	8	10	12	5,000,000.00	14	20,000,000.00	16	40,000,000.00	18	60,000,000.00	20	80,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kot a														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12	12	12	2,500,000.00	12	10,000,000.00	12	20,000,000.00	12	30,000,000.00	12	40,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	8	10	12	2,500,000.00	14	10,000,000.00	16	20,000,000.00	18	30,000,000.00	20	40,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (IKK)	8.56	10.29	12.0 1	7,500,000.00	13.7 3	20,000,000.00	15.4 5	40,000,000.00	17.1 7	60,000,000.00	18.8 9	80,000,000.00	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase Pelaku industri yang mengakses Sistem informasi	497	597	697	7,500,000.00	797	20,000,000.00	897	40,000,000.00	997	60,000,000.00	1097	80,000,000.00	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	12	12	2,500,000.00	12	7,000,000.00	12	13,500,000.00	12	20,000,000.00	12	27,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRA/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	12	12	12	2,500,000.00	12	6,500,000.00	12	13,500,000.00	12	20,000,000.00	12	27,000,000.00	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	12	12	12	2,500,000.00	12	6,500,000.00	12	13,000,000.00	12	20,000,000.00	12	26,000,000.00	

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran operasional yang terukur bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam merumuskan Renstra. Semua sasaran disusun linier, mulai dari NSPK, tujuan, sasaran, outcome, hingga output yang dapat diverifikasi melalui indikator kinerja kuantitatif. Rangkaian program/kegiatan/sub kegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, hingga pencapaian tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam		
		Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Terbitnya Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
		Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Kesehatan KSP/USP Koperasi		
		Meningkatnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian		
		Meningkatnya Kompetensi Pengurus Koperasi yang telah mendapatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan		
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	
			Pembentukan Koperasi merah putih (Pelatihan Penataan Manajemen Koperasi	
			Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)		
		Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemulihan Usaha Mikro	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
			Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil		
		Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			Pengembangan Usaha Mikro	
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
			Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
			Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
			Penataan Outlet UMKM (Penataan atap gedung)	
			Penataan UMKM centre (Rumah Kemasan) (Penataan Atap Gedung)	
			[PIK] - Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM	
			[PIK] - Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM	
			Hibah] - kepada Badan atau Lembaga UMKM	
			[Hibah] - kepada Badan atau Lembaga UMKM	
			[Hibah] - kepada LPM (UMKM)	
			[Hibah] - kepada Badan atau Lembaga UMKM	
			[Hibah] - kepada Badan atau Lembaga UMKM	
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Pemberian Rekomendasi perizinan pendaftaran perusahaan		
		Terbitnya Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
		Terbitnya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
		Terbitnya Dokumen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	
		Terbitnya Dokumen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
			Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	
			Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	
			Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
			Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
		Terbitnya Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
			Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	
		Meningkatnya pengendalian dan pengawasan bahan berbahaya	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan		
		Terbangun dan terkelolanya Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pembangunan 7 Pasar Kecamatan	
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
			Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
		Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
		Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
		Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang menjadi eksportir		
		Terselenggaranya Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pameran Dagang Nasional	
			Pameran Dagang Lokal	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya alat metrologi yang sesuai standar		
		Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Penyidikan Metrologi Legal	
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
		Meningkatnya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pembangunan industri		
		Tersusunnya dan terevaluasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			[Hibah] - kepada Badan atau Lembaga Perindustrian	
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
15	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		
		Terbitnya Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
		Meningkatnya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama yang mencerminkan pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mendukung pencapaian target nasional.

Penetapan IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian bertujuan untuk:

1. Menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
2. Memberikan fokus prioritas pada capaian yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang'

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	76,09	77,09	78,09	79,09	80,09	81,09
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	5.98	7.97	9.96	11,95	13,94	15,93
3	Pertumbuhan Wirausaha	Unit Usaha	15.338	15,488	15,638	15,788	15,938	16,088
4	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	10.29	12.02	13.76	15.51	17.26	19,02

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang untuk periode tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mendorong koperasi menjadi lebih kuat, modern, dan berdaya saing. Proyeksi pertumbuhan yang konsisten setiap tahun mencerminkan adanya strategi berkesinambungan dalam meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

Indikator yang digunakan adalah Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dengan satuan persen (%). Target kinerja sasaran ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, pertumbuhan volume usaha koperasi ditargetkan sebesar 5,98% sebagai titik awal.

Selanjutnya, pada tahun 2026 target naik menjadi 7,97%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2027 menjadi 9,96%.

Pertumbuhan ini terus berlanjut dengan tren positif, di mana pada tahun 2028 ditargetkan mencapai 11,95%, lalu meningkat menjadi 13,94% pada tahun 2029. Puncaknya, pada tahun 2030, target pertumbuhan volume usaha koperasi ditetapkan sebesar 15,93%, atau lebih dari dua kali lipat capaian awal tahun 2025.

Faktor Pendorong Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi :

1. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Koperasi
 - Peningkatan kapasitas pengurus dan manajemen koperasi melalui pelatihan dan pendampingan.
 - Penerapan tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.
 2. Digitalisasi dan Inovasi Layanan
 - Pemanfaatan teknologi digital untuk pencatatan keuangan, pemasaran online, hingga sistem layanan anggota.
 - Inovasi produk dan jasa koperasi agar lebih kompetitif di pasar.
 3. Dukungan Pemerintah Daerah
 - Kebijakan dan regulasi yang berpihak pada penguatan koperasi.
 - Fasilitasi akses permodalan, insentif, dan program pengembangan usaha.
 4. Integrasi dengan UMKM, Pertanian, dan Perdagangan
 - Koperasi menjadi wadah kolektif untuk menyalurkan produk UMKM dan hasil pertanian.
 - Peran koperasi sebagai bagian dari rantai pasok perdagangan daerah.
 5. Akses Permodalan yang Lebih Luas
-

- Koneksi dengan lembaga keuangan perbankan maupun non-bank.
 - Program pembiayaan inklusif untuk mendukung ekspansi usaha koperasi.
6. Peningkatan Kesadaran dan Kepercayaan Anggota
- Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat koperasi.
 - Peningkatan kepercayaan melalui pelayanan yang lebih baik dan hasil usaha yang nyata.
7. Kemitraan Strategis
- Kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN, dan BUMD dalam pemasaran, distribusi, maupun pengembangan usaha koperasi.

2. Pertumbuhan Wirausaha

Pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Sumedang menjadi salah satu fokus strategis dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian daerah berbasis kerakyatan. Wirausaha berperan penting sebagai motor penggerak ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mendorong daya saing daerah.

Dalam periode Renstra ini, arah kebijakan diarahkan pada peningkatan jumlah dan kualitas wirausaha melalui strategi yang terintegrasi. Pada tahap awal, pemerintah daerah berfokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan penyederhanaan regulasi, pemberian kemudahan akses permodalan, dan penyediaan sarana pendukung. Selanjutnya, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia wirausaha melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, serta penguasaan teknologi digital untuk menghadapi tantangan pasar modern.

Pertumbuhan wirausaha juga didorong dengan integrasi ke dalam rantai pasok sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, dan industri kecil. Dengan demikian, wirausaha tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Sehingga Renstra menargetkan terwujudnya wirausaha yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat mengakses pasar yang lebih luas, baik regional, nasional, maupun internasional. Keberhasilan pertumbuhan wirausaha akan menjadi outcome strategis berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya pengangguran, serta meningkatnya kemandirian ekonomi Kabupaten Sumedang.

3. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi

Fasilitasi perizinan usaha perdagangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Sumedang. Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong formalitas kegiatan usaha masyarakat.

Dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, indikator ini diarahkan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada pelaku usaha perdagangan. Semakin tinggi persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi, semakin besar pula jumlah pelaku usaha yang memperoleh legalitas, sehingga mampu memperluas akses ke pembiayaan, pasar, dan program pembinaan usaha.

Tahapan kebijakan diarahkan mulai dari penyederhanaan proses perizinan dengan pemanfaatan layanan berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, hingga penguatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya legalitas usaha.

Melalui fasilitasi izin usaha perdagangan, pemerintah daerah juga berupaya membangun basis data usaha yang lebih valid, yang akan mendukung perencanaan pembangunan sektor perdagangan secara lebih terarah. Pada akhirnya, pencapaian target persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pelaku usaha formal, meningkatkan volume perdagangan, memperkuat daya saing daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang.

4. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri

Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri merupakan indikator strategis yang menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah dalam menarik, memfasilitasi, dan merealisasikan komitmen investasi ke dalam aktivitas ekonomi nyata. Di Kabupaten Sumedang, indikator ini sangat penting karena sektor industri dan kawasan industri menjadi penggerak utama dalam memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta menyerap tenaga kerja.

Dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, indikator ini diarahkan untuk mengukur efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong investasi. Realisasi investasi yang tinggi

mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai, serta menghadirkan regulasi yang ramah investor. Selain itu, keberhasilan menarik investasi juga memperlihatkan daya saing daerah dalam berkompetisi dengan wilayah lain.

Tahapan kebijakan yang ditempuh meliputi:

1. Meningkatkan promosi dan kemudahan investasi melalui digitalisasi layanan, sistem perizinan terpadu, dan penyediaan informasi investasi yang transparan.
2. Mengoptimalkan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan dukungan infrastruktur, logistik, dan energi yang memadai.
3. Mengefektifkan peran kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mempercepat realisasi investasi.
4. Pemantapan monitoring dan evaluasi investasi agar komitmen investasi benar-benar terealisasi sesuai rencana.
5. Perwujudan investasi berkelanjutan yang berbasis pada daya saing, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Dengan meningkatnya persentase realisasi investasi di sektor industri dan kawasan industri, Kabupaten Sumedang akan memiliki basis ekonomi yang lebih kuat, terbukanya lapangan kerja baru, meningkatnya kapasitas produksi daerah, serta tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian merupakan ukuran utama keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. IKK berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penetapan IKK didasarkan pada regulasi perencanaan pembangunan daerah serta prinsip **SMART** (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Dengan demikian, indikator yang digunakan benar-benar menggambarkan outcome utama dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Tabel. 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE			TARGET TAHUN				KETERANGAN
				TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	positif	Persentase	3,35	4,32	5,28	6,24	7,2	8,16	9,12	
3.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	positif	Persentase	7,97	9,96	11,95	13,94	15,93	17,92	19,91	
4.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	positif	%	43,31	52,33	65,23	70,61	76,00	81,38	86,76	
5.	Pertumbuhan Wirausaha	positif	Persentase	-	12,7	35,9	50,7	64,4	78,6	92,8	
6.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	positif	%	8,68	9,93	11,2	12,4	13,6	14,9	16,1	
7.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
8.	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	Persentase	36,26	38,37	42,61	44,73	46,85	48,97	51,09	
10.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	positif	Persentase	88,89	88,89	100	100	100	100	100	
12.	Persentase kinerja realisasi pupuk	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
14.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
15.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	positif	Persentase	-	60	65	68	70	73	75	

16.	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	positif	%	-	50	65	70	75	80	85	
17.	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	positif	%	-	60	65	70	75	80	90	
18.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
19.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	positif	%	8,56	10,29	12,01	13,73	15,45	17,17	18,89	
20.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	positif	%	71,56	75,49	77,94	80,39	82,84	85,29	87,74	
21.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
22.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel 4. diatas, IKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mencakup 4 urusan yaitu : Urusan Koperasi, Urusan Usaha Kecil Menengah, Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian

Untuk urusan Koperasi sesuai dengan yang tertera didalam pedoman umum peyusunan LPPD Tahun 2024 Kabupaten Sumedang yang dikeluarkan oleh kemendagri RI terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Pertumbuhan volume usaha koperasi merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi di Kabupaten Sumedang. Indikator ini tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi koperasi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana koperasi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan anggota.

Dalam konteks Renstra, indikator pertumbuhan volume usaha koperasi diarahkan untuk memastikan koperasi tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi juga berkembang secara substantif dalam skala usaha, produktivitas, dan integrasi dengan sektor-sektor unggulan daerah. Melalui target pertumbuhan yang terukur setiap tahunnya, indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan penguatan kelembagaan, fasilitasi akses permodalan, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas manajemen koperasi.

Capaian pertumbuhan volume usaha koperasi yang konsisten akan menghasilkan beberapa manfaat strategis, antara lain:

1. Meningkatnya kontribusi koperasi terhadap PDRB daerah.
2. Penguatan peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
3. Tersedianya wadah pemasaran dan distribusi yang lebih efektif bagi produk UMKM dan sektor pertanian.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sehat, transparan, dan modern.

Dengan demikian, pertumbuhan volume usaha koperasi sebagai IKK menjadi instrumen penting dalam memantau kinerja pembangunan ekonomi kerakyatan. Melalui indikator ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa koperasi benar-benar menjadi pilar ekonomi lokal yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan, serta mampu mendorong tercapainya visi pembangunan Kabupaten Sumedang.

2. Untuk urusan Usaha Kecil dan menengah sesuai dengan yang tertera didalam pedoman umum penyusunan LPPD Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal

Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal merupakan salah satu IKK strategis yang mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong legalitas usaha. Transformasi ini penting karena status formal memberikan berbagai keuntungan, seperti kepastian hukum, akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, kesempatan mengikuti program pembinaan pemerintah, serta peluang yang lebih besar untuk memasuki pasar modern.

Dalam konteks Renstra, indikator ini diarahkan untuk memastikan bahwa semakin banyak usaha kecil yang mendapatkan izin resmi dan tercatat dalam sistem. Capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan strategi fasilitasi perizinan, penyederhanaan regulasi, pemanfaatan layanan digital, serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya formalitas usaha. Dengan meningkatnya persentase usaha kecil yang beralih ke status formal, diharapkan terbentuk basis data usaha yang lebih valid dan terintegrasi, sehingga mendukung perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.

2. Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor

Proporsi UKM yang menjalin kemitraan dan ekspor merupakan IKK penting yang menunjukkan sejauh mana UKM mampu memperluas jaringan usaha dan mengakses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Kemitraan yang dibangun dapat berupa kerja sama dengan koperasi, perusahaan besar, BUMN, BUMD, maupun jejaring distribusi modern. Sementara itu, keterlibatan UKM dalam ekspor menandakan peningkatan daya saing produk lokal di kancah global.

Dalam kerangka Renstra, indikator ini diarahkan untuk mendorong UKM agar tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga mampu naik kelas melalui kolaborasi dan penetrasi pasar ekspor. Hal ini didukung melalui fasilitasi peningkatan kualitas produk, sertifikasi, pengembangan branding, serta promosi dagang internasional. Peningkatan proporsi UKM yang bermitra dan berorientasi ekspor akan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mengangkat citra Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang produktif dan kompetitif

3. Urusan lainnya dalam peyusunan LPPD Tahun 2024 yaitu urusan Perdagangan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi

Indikator ini mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku perdagangan. Semakin tinggi persentase izin yang difasilitasi, semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh legalitas, sehingga dapat memperluas akses ke pasar, permodalan, dan program pembinaan.

2. Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya

Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan sarana perdagangan yang aman, nyaman, higienis, dan sesuai standar. Peningkatan kualitas sarana perdagangan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan daya tarik pusat-pusat perdagangan.

3. Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator ini menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga barang pokok. Stabilitas harga menjadi kunci untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menciptakan kepastian usaha bagi pedagang.

4. Nilai Ekspor Barang

Indikator ini menggambarkan kinerja perdagangan daerah dalam menjangkau pasar global. Peningkatan nilai ekspor menunjukkan bahwa produk lokal memiliki daya saing dan kualitas yang mampu menembus pasar internasional, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

Indikator ini menilai responsivitas pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen. Semakin tinggi persentase penanganan pengaduan, semakin baik perlindungan konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan daerah.

6. Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan

Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong produk lokal agar lebih dikenal dan berdaya saing di pasar regional, nasional, maupun internasional. Promosi yang difasilitasi tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat citra daerah sebagai penghasil produk unggulan

4. Urusan terakhir dalam penyusunan LPPD adalah urusan perindustrian, penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri

Indikator ini mengukur sejauh mana komitmen investasi benar-benar terealisasi di sektor industri dan kawasan

industri. Capaian yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus memperkuat struktur ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

2. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan

Indikator ini mencerminkan kemudahan dan kecepatan layanan perizinan di sektor industri. Semakin tinggi persentase izin yang diterbitkan, semakin banyak pelaku usaha industri yang memperoleh legalitas untuk beroperasi secara formal, sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDRB daerah.

3. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

Indikator ini menekankan pentingnya basis data dan informasi industri yang valid sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan promosi investasi. Ketersediaan informasi yang lengkap dan mutakhir mendukung transparansi, memudahkan investor, serta memperkuat daya saing daerah di bidang industri.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumedang 2025–2029 dan menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Beberapa substansi penting dalam Renstra 2025-2029 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Sektor Terkait

Profil ekonomi daerah, khususnya kontribusi koperasi, UMKM, perdagangan, dan industri terhadap PDRB.

Potensi unggulan daerah (pertanian, pariwisata, produk lokal, kawasan industri).

Permasalahan utama: keterbatasan akses modal, rendahnya daya saing, lemahnya kelembagaan, hingga persoalan digitalisasi.

2. Isu Strategis Pembangunan

Kebutuhan peningkatan kualitas dan daya saing koperasi.

Transformasi UMKM dari informal ke formal.

Penguatan daya saing produk lokal melalui branding, digitalisasi, dan perluasan pasar.

Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Peningkatan investasi industri dan optimalisasi kawasan industri.

Perlindungan konsumen serta penguatan ekosistem perdagangan modern.

3. Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan

Selaras dengan RPJMD dan visi Kabupaten Sumedang.

Penekanan pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan akses usaha, dan daya saing daerah.

4. Sasaran dan Arah Kebijakan

Koperasi: Meningkatkan koperasi berkualitas, sehat, dan modern.

UMKM: Mendorong usaha mikro kecil naik kelas melalui kemitraan, digitalisasi, dan akses permodalan.

Perdagangan: Memperluas pasar produk lokal, meningkatkan sarana perdagangan, menjaga stabilitas harga, dan memperkuat perlindungan konsumen.

Perindustrian: Meningkatkan unit usaha industri baru, memperkuat kawasan industri, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Beberapa IKK utama, antara lain:

- Pertumbuhan volume usaha koperasi.
- Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal.
- Proporsi UKM yang bermitra dan melakukan ekspor.
- Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi.
- Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya.
- Nilai ekspor barang.
- Persentase realisasi investasi sektor industri.
- Persentase izin usaha industri yang diterbitkan.

6. Strategi dan Pentahapan Pembangunan

Tahap 1: Meningkatkan → pemberdayaan koperasi dan UMKM serta fasilitasi perizinan.

Tahap 2: Mengoptimalkan → digitalisasi, promosi produk, kemitraan usaha.

Tahap 3: Mengefektifkan → penguatan rantai pasok dan kawasan industri.

Tahap 4: Pemantapan → ekspansi pasar, peningkatan investasi, dan konsolidasi koperasi modern.

Tahap 5: Perwujudan → ekosistem ekonomi daerah yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

7. Program dan Kegiatan Prioritas

- Peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM.
- Fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan inklusif.
- Digitalisasi sistem perizinan dan layanan usaha.
- Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.
- Promosi produk unggulan daerah dan perluasan pasar ekspor.
- Penguatan kawasan industri dan hilirisasi produk lokal.

Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

Pelaksanaan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025-2029 berpedoman kaidah sebagai berikut ;

- Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kanupaten Sumedang tahun 2025-2029
- Dijalankan dengan sinergis dan terintegrasi dengan program pemerintah pusat dan propinsi
- Mengutamakan pendektan good governance dan transformasi digital pemerintahan

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh jajaran perangkat daerah dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, arah pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian akan mampu mewujudkan pemerintahan yang terbuka, informatif, aman, dan berbasis data guna mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 yaitu *“Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”*.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR